



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 585/KPTS/VII/2026

TENTANG

PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 56);
11. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 42);
12. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2026 tentang Nomenklatur, Kelas dan Nilai Jabatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 Nomor 17);

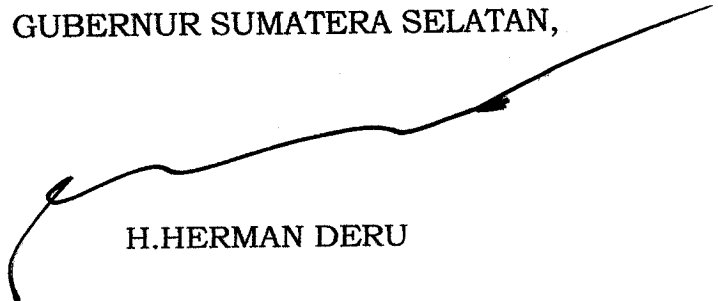
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan antara lain dalam penyusunan formasi jabatan dan persyaratan mutasi jabatan serta penataan kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1006/KPTS/VII/2025 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 september 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



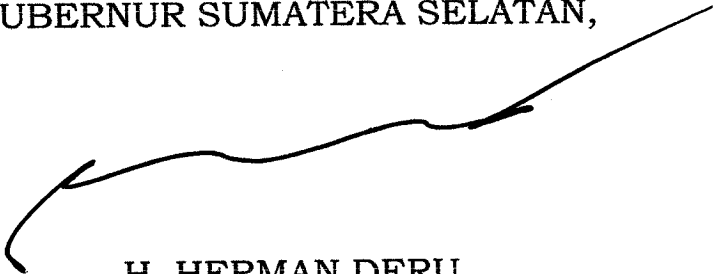
H.HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta.
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	HASIL ABK (Jam / Tahun)	IDEAL STANDAR HASIL ABK (Jam / Tahun)	Efektifitas dan Efisiensi Jabatan (EJ)	Kelebihan Kekurangan Pegawai		Prestasi Kerja Jabatan (PJ)
						+	-	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>
89	Pengelola Layanan Operasional	1	1,240	1250	0.99	-	0	Sangat Baik
90	Pengadministrasi Perkantoran	1	1,250	1250	1.00	-	0	Sangat Baik
91	Operator Layanan Operasional	1	1,125	1250	0.90	-	0	Sangat Baik
Jumlah		110				0	167	

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

PETA JABATAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

